

Di Antara Terumbu dan Pasang yang Meninggi: Suara Komunitas, Perikanan, dan Masa Depan Konservasi di Kepulauan Togean

ASEAN Biodiversity Project Note No. 2026-03

Saat fajar menyingsing di Kepulauan Togean, laut tampak menipu—tenang di permukaan tapi dibawah laut bergelombang. Dari rumah-rumah panggung permukiman Bajau hingga pesisir Una-Una yang dipagari terumbu karang, air laut memantulkan ketangguhan yang sunyi—yang menyembunyikan perubahan besar yang tengah berlangsung di bawahnya. Selama beberapa generasi, laut telah memberi makan keluarga, membentuk identitas, dan menjadi jangkar budaya di seluruh kepulauan Sulawesi Tengah ini. Di sisi lain, para nelayan, perempuan, tetua adat, dan pemuda di seluruh kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean (TNKT) menyuarakan kekhawatiran yang sama: laut tidak lagi berlebihan dahulu.

Selama setahun terakhir, setelah serangkaian konsultasi, pertemuan pemetaan persepsi, kegiatan pemantauan perikanan, dan pengamatan lapangan—yang dilakukan dalam kerangka inisiatif ASEAN ENMAPS bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan, TNKT, pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat—mengungkapkan sebuah kisah yang kompleks dan sangat manusiawi. Ini adalah kisah tentang menurunnya stok ikan, mudahnya praktik-praktik tradisional, naiknya permukaan laut, tantangan tata kelola, dan sebagai upaya solusi berbasis komunitas yang masih berjuang untuk tumbuh.



Kabalutan Village, Togeian Islands, Central Sulawesi

Tangkapan Menurun, Kekhawatiran Meningkat

Di berbagai desa—Tiga Pulau, Kabalutan, Pulau Enam, Tongkabo, dan lainnya—para nelayan menggambarkan pola yang konsisten: yang dulu ditempuh dalam hitungan jam kini memakan waktu berhari-hari, dan yang dulu melimpah kini mengharuskan melaut lebih jauh dari pantai.

Di Tiga Pulau, nelayan mengingat bahwa penangkapan gurita telah mendorong mereka ke terumbu yang semakin jauh sejak 2020. Tangkapan layang (*Decapterus* sp.) mulai menurun sejak 2018. Di Kabalutan, salah satu permukiman Bajau terbesar di Togeian, kondisinya bahkan lebih mencolok. Nelayan melaporkan bahwa hasil tangkapan yang didaratkan telah turun hingga hampir seperlima dibandingkan dua dekade lalu, dengan penurunan yang mulai terasa sekitar 2004.

“Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam,” ujar seorang nelayan. “Tapi setiap tahun, rasanya makin berat.”

Spesies yang ditangkap mencerminkan kebutuhan ekonomi sekaligus tekanan ekologi. Ikan demersal bernilai tinggi seperti sunu super merah (*Plectropomus leopardus*) dan kerapu tiger (*Epinephelus fuscoguttatus*) tetap menjadi incaran, sementara gurita (*Octopus cyanea*) muncul sebagai spesies kunci bagi penghidupan sekaligus simbol konservasi berbasis komunitas. Spesies pelagis seperti lolosi (*Caesionidae*) dan jukueja (*Nemipterus japonicus*) masih didaratkan dalam jumlah cukup besar, meski tanda-tanda tekanan juga mulai terlihat.

Masalah ini diperparah oleh meluasnya penggunaan penangkapan ikan malam hari dengan tombak dan kompresor (hookah) dalam satu dekade terakhir, khususnya di Kabalutan dan desa-desa lain. Meski hookah dan praktik penangkapan destruktif secara resmi dilarang oleh peraturan kabupaten dan aturan Taman Nasional, penegakan hukum masih belum merata, dan di sebagian besar lokasi belum ada peraturan tingkat desa yang mengatur secara khusus.

Kearifan Nama dan Sunyinya Tradisi

Bagi masyarakat Bajau—atau Sama, sebutan budaya mereka—laut tidak pernah menjadi ruang tanpa peta. Jauh sebelum ada peta zonasi dan jadwal patroli, komunitas Bajau telah mengembangkan sistem pengetahuan spasial mereka sendiri, yang tertanam dalam nama, cerita, dan pantangan.

Terumbu diberi nama bukan secara acak, melainkan relasional. Sappa Buntar merujuk pada formasi terumbu yang membulat; Sappa Matilla menggambarkan area yang cerah dan jernih. Lokasi lain dinamai berdasarkan nelayan yang erat kaitannya—Sappa Loong atau Sappa Mbo Tukang—sementara tempat seperti Sappa Ruma mengingatkan pada keberadaan pondok kecil untuk beristirahat di atas terumbu.

Beberapa nama memiliki makna yang lebih dalam. Sappa Kokko, atau “batu setan,” diyakini sebagai area yang berbahaya secara spiritual. Selama beberapa generasi, keyakinan ini membuat orang enggan menangkap ikan di sana—yang mungkin tanpa disadari—menyebabkan biomassa ikan lebih tinggi dibandingkan terumbu di sekitarnya. Rasa takut, dalam hal ini, berfungsi sebagai konservasi.

Namun banyak praktik ini telah memudar. Ritual harian jarang dilakukan. Aturan adat tidak lagi ditegakkan. Generasi muda, yang menghadapi tekanan ekonomi dan perubahan norma sosial, tidak lagi menjadikan pantangan budaya sebagai pedoman pemanfaatan sumber daya.

“Pengetahuannya masih ada,” ujar seorang tetua dengan pelan. “Tapi sudah tidak lagi diikuti.”

Eksperimen Konservasi Berbasis Komunitas

Meski tantangan besar, muncul kantong-kantong inovasi dan harapan. Di Desa Kadoda, Kelompok Nelayan Konservasi Kogito—“kogito” berarti gurita dalam bahasa Bajau—bekerja sama dengan Jaringan Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (JAPESDA) menerapkan sistem penutupan musim penangkapan gurita. Didukung oleh TNKT, inisiatif ini menjadi salah satu contoh paling jelas pengelolaan perikanan berbasis komunitas di dalam kawasan Taman Nasional. Percakapan informal dengan warga menunjukkan bahwa mereka telah mulai melihat sinyal ekologi yang positif dari penerapan kogito. [KC1.1]

Kadoda Village, Togeang Islands, Central Sulawesi





Pulau Enam village, Togean Islands, Central Sulawesi

TNKT juga mendukung pengembangan keramba ikan di Saloli untuk mendiversifikasi mata pencaharian dan meningkatkan pendapatan rumah tangga, sekaligus menguji coba “smart patrol” yang melibatkan anggota komunitas dua kali seminggu. Patroli ini menggabungkan penegakan aturan dengan pemantauan biota, memperkuat gagasan bahwa masyarakat bukan sekadar penerima manfaat konservasi, melainkan penjaga aktif.

Pimpinan Taman Nasional menyampaikan visi yang jelas: mengubah persepsi Taman sebagai otoritas yang membatasi, menjadi institusi yang memberdayakan usaha lokal berkelanjutan. Optimalisasi status Kepulauan Togean sebagai Cagar Biosfer UNESCO, menurut mereka, dapat membuka peluang baru bagi ekowisata, produk bernilai tambah, dan perikanan berkelanjutan.

Perempuan, Pemuda, dan “Mata Rantai yang Hilang”

Dalam pertemuan-pertemuan komunitas di Togean, suara perempuan semakin terlihat—namun kesenjangan struktural masih ada.

Di Tiga Pulau, belum terdapat Rencana Aksi Gender formal maupun kelompok usaha perempuan yang terorganisasi. Perempuan umumnya mengidentifikasi diri sebagai ibu rumah tangga, meski banyak yang menambah pendapatan dengan menjual kue atau mengolah ikan asin. Mereka berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, tetapi belum ada program khusus untuk memperkuat keterampilan atau mengembangkan usaha.

Sebaliknya, Pulau Enam telah mengintegrasikan pemberdayaan perempuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Kelompok perempuan aktif, dan akses air bersih—

kebutuhan dasar yang masih belum terpenuhi di Tiga Pulau—telah mengubah kehidupan sehari-hari. Setiap rumah tangga di Pulau Enam menerima air perpipaan, meningkatkan kesehatan dan memberi lebih banyak waktu untuk kegiatan produktif.

Kabalutan menghadirkan gambaran yang lebih kompleks. Perempuan menyatakan bahwa mereka memiliki peran setara dengan laki-laki, termasuk dalam menangkap ikan dan mencari nafkah. Sebagian mengembangkan keterampilan pengolahan hasil laut dan kerajinan daur ulang. Para guru di antara mereka menyuarakan keprihatinan terhadap tren pernikahan dini dan mulai menjalankan program pendampingan informal bagi siswa. Namun, kesempatan pendidikan tetap terbatas, dan kebuntuan tata kelola desa—ditandai dengan tidak adanya kepala desa dan sekretaris—menghambat pembangunan yang lebih luas.

Di semua desa, partisipasi pemuda diakui sangat penting tetapi masih kurang berkembang. Tanpa alternatif mata pencaharian atau jalur keterlibatan yang jelas, banyak anak muda melihat perikanan sebagai satu-satunya pilihan, meski hasil tangkapan terus menurun.

Kesenjangan Tata Kelola dan Jalur Pengaduan

Salah satu pesan paling konsisten dari komunitas berkaitan dengan tata kelola—khususnya konsultasi, komunikasi, dan akuntabilitas.

TNKT mengonfirmasi keberadaan mekanisme penanganan pengaduan (Grievance Redress Mechanism/GRM), meski dalam praktiknya sebagian besar keluhan disampaikan secara informal melalui telepon atau aplikasi pesan kepada petugas lapangan. Dalam kerangka ASEAN ENMAPS, sistem GRM tingkat desa (Tier 1) telah dikembangkan dan dihubungkan secara formal dengan proyek, dengan perjanjian yang ditandatangani dan proses FPIC yang terdokumentasi di Tiga Pulau, Kabalutan, dan Pulau Enam.



Village head of Pulau Enam signing the Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) document of ASEAN ENMAPS



Women representatives of Tiga Pulau Village signing the FPIC document of ASEAN ENMAPS

Komunitas menyampaikan preferensi yang jelas: pertemuan tatap muka tetap menjadi saluran komunikasi yang paling dipercaya, didukung oleh kotak saran dan materi cetak. Mereka juga mengharapkan pembaruan rutin—setiap tiga atau enam bulan—tentang perkembangan proyek.

Di Kabalutan, kekecewaan terhadap absennya kepemimpinan desa mendominasi diskusi. Warga menyoroti proyek infrastruktur yang terhenti, seperti jembatan yang belum selesai, sebagai bukti kegagalan tata kelola. Strategi keterlibatan apa pun di sini harus menavigasi ketegangan yang ada dengan hati-hati, memastikan inklusi otoritas formal maupun pemimpin informal yang dihormati, termasuk mantan nelayan yang pernah terlibat dalam praktik destruktif.

Una-Una: Jalur yang Berbeda

Di Pulau Una-Una, ceritanya mengambil arah yang sedikit berbeda. Di sini, pertanian dan pariwisata menjadi tulang punggung penghidupan masyarakat. Para pemimpin desa secara terbuka mengakui nilai terumbu karang yang sehat, bukan hanya sebagai habitat ikan tetapi juga sebagai aset pariwisata.

Survei cepat terumbu karang yang dilakukan di sisi timur pulau oleh tim ASEAN ENMAPS mengonfirmasi klaim tersebut: tutupan karang sehat, ikan hias dan herbivora melimpah, keberadaan alga rendah, serta indikator ketahanan terhadap perubahan iklim. Pemandu selam menguatkan bahwa terumbu di dekat permukiman aktif dilindungi oleh warga setempat, sementara wilayah barat yang tidak berpenghuni masih sesekali mengalami pengeboman ikan.

Bagi Una-Una, rekomendasinya jelas: mempertahankan perikanan sebagai kegiatan artisanal dan subsisten, sambil memperkuat pariwisata dan pertanian yang berkelanjutan.

Menuju Lanskap Laut yang Inklusif

Apa yang muncul dari Kepulauan Togeian bukanlah narasi tunggal tentang kemunduran, melainkan lanskap berlapis antara tantangan dan peluang. Perikanan berada di bawah tekanan. Dampak iklim semakin terlihat. Struktur tata kelola tidak merata tapi masyarakat bukanlah pengamat pasif.

Mereka menamai masalah, mengusulkan solusi, menghidupkan kembali unsur tradisi, dan menuntut ruang untuk terlibat.

Seiring ASEAN ENMAPS melangkah maju, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang lebih kuat atau data yang lebih baik, tetapi oleh kepercayaan—yang dibangun melalui transparansi, keterlibatan inklusif, dan manfaat nyata. Konservasi di sini tidak dapat dibingkai semata sebagai pembatasan. Ia harus dirasakan sebagai pemberdayaan.

Seperti yang diungkapkan seorang peserta komunitas, “Kami tidak ingin laut ditutup untuk kami. Kami ingin laut tetap hidup.”

Di antara terumbu dan pasang yang meninggi, masa depan Kepulauan Togean akan ditentukan oleh seberapa baik kebijakan mendengarkan masyarakat—dan seberapa dalam masyarakat dilibatkan untuk membentuk kebijakan yang mengatur laut mereka.

Artikel ini telah ditinjau untuk memastikan penggunaan bahasa yang inklusif gender dan memberdayakan.

Proyek Effectively Managing Networks of Marine Protected Areas in Large Marine Ecosystems in the ASEAN region (ASEAN ENMAPS) bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan jejaring kawasan konservasi laut (Marine Protected Area/MPA) di kawasan Large Marine Ecosystems (LME) utama yang mencakup Indonesia, Filipina, dan Thailand. Proyek ini menerapkan strategi berbasis ilmu pengetahuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan menjaga keberlanjutan perikanan. Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk memperkuat tata kelola, membangun kapasitas para pemangku kepentingan, mendorong berbagi pengetahuan, serta mengembangkan pembiayaan berkelanjutan bagi upaya konservasi jangka panjang. ASEAN ENMAPS dilaksanakan oleh United Nations Development Programme dengan pendanaan dari Global Environment Facility, dan ASEAN Centre for Biodiversity sebagai lembaga pelaksana.

Untuk pertanyaan terkait Proyek ASEAN ENMAPS, silakan hubungi:

Sekretariat Proyek ASEAN ENMAPS

enmaps@aseanbiodiversity.org

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi enmaps.aseanbiodiversity.org

Hubungi kami di:

ASEAN Centre for Biodiversity

D.M. Lantican Avenue

University of the Philippines

Los Banos, Laguna, Philippines 4031

contact.us@aseanbiodiversity.org

Editorial Staff:

Advisers:

Jerome L. Montemayor
Corazon A. de Jesus, Jr.
Pamela Q. Reblora

Managing Editor:

Sheila G. Vergara

Technical Reviewer:

Vincent V. Hilomen

Contributors:

Nining N. Purnamaningtyas

Sasi

Monica Dyah Rahmaningsih (Ministry of Forestry)

Amelia Puspita Anggraeni (Ministry of Forestry)

Eva Setivani (Ministry of Forestry)

Abdul Rajab (Head of Kepulauan Togean NP)

Fahri Angriawan (KTNP)

Muhsinin (KTNP)

Abdullah Habibi

Rian Isidoro

Christoverius Hutabarat

Language Editors:

Kalikasan C. Cuevas

Charisse M. Jordan

Graphic and Layout Artist:

Jonna Ellaine A. Jordan